

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor strategis yang menopang ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani di Indonesia. Selain berfungsi sebagai penyedia utama kebutuhan pangan, sektor pertanian juga berkontribusi penting dalam mempertahankan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan di bidang ketahanan pangan. Salah satu komoditas pertanian yang paling banyak dibudidayakan adalah tanaman padi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), pada tahun 2024 luas panen komoditas tanaman padi di Indonesia mencapai sekitar 10.05 juta hektare dengan hasil produksi padi mencapai 53,14 juta ton gabah kering giling (GKG). Data ini menunjukkan bahwa padi masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional dan sumber penghidupan bagi jutaan rumah tangga petani. Ketersediaan padi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kondisi ketahanan pangan nasional di Indonesia. Dengan demikian, upaya untuk menjaga keberlanjutan serta peningkatan produksi padi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif pelaku usaha dan masyarakat, terutama petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang terbesar produksi padi di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2024, total produksi padi di Jawa Timur mencapai 9.270.435,29 ton, atau sekitar 17,4% dari total produksi padi nasional. Angka ini menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan wilayah strategis dalam penyediaan beras bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui produksi padi. Sebagai salah satu sentra pertanian terbesar di provinsi tersebut, Jember dikenal memiliki luas panen, dan tingkat produksi dan produktivitas yang tergolong tinggi. Adapun data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2024

Tahun	Luas Panen (ha)	Total Produksi (ku)	Produktivitas (ku/ha)
2015	166.178,90	986.653	59,37
2016	164.656,00	1.004.898	61,03
2017	162.360,00	960.602	59,16
2018	164.371,00	984.201	59,88
2019	157.344,00	997.838	63,42
2020	160.347,00	993.892	61,98
2021	157.596,00	961.977	61,04
2022	161.004,00	983.663	61,10
2023	160.135,00	988.135	61,71
2024	158.727,00	981.835	61,86
Rata-rata	161.271,89	984.369,4	61,05

Sumber : BPS Kabupaten Jember (2025).

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama periode 2015 – 2024 luas panen padi di Kabupaten Jember cenderung menurun dari 166.178,90 ha menjadi 158.727,00 ha, meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2018 sebesar 164.371,00 ha dan tahun 2020 sebesar 160.347,00 ha. Total produksi padi juga menunjukkan perubahan naik turun, dengan hasil tertinggi pada tahun 2016 sebesar 1.004.898 ku dan terendah pada tahun 2017 sebesar 960.602 ku, namun dalam beberapa tahun terakhir, total produksi berada pada kondisi relatif stabil. Sementara itu, produktivitas padi terus meningkat dari 59,37 ku/ha pada 2015 menjadi 61,86 ku/ha pada 2024, bahkan mencapai puncak tertinggi sebesar 63,42 ku/ha pada 2019. Secara keseluruhan, rata-rata luas panen mencapai 161.271,89 ha, rata-rata total produksi sebesar 984.369,4 ku, dan rata-rata produktivitas sebesar 61,05 ku/ha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun luas lahan panen berkurang, peningkatan produktivitas mampu menyeimbangkan penurunan tersebut sehingga total produksi padi di Kabupaten Jember tetap stabil.

Upaya menjaga kestabilan produksi pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan di bidang pertanian melalui diluncurkannya kebijakan dengan bermacam program.

Salah satu kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan yaitu kebijakan subsidi pupuk. Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, menurunkan biaya produksi petani, serta dapat mendorong peningkatan produktivitas. Namun, dalam perkembangannya, kebijakan ini terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan petani. Setiap perubahan kebijakan subsidi pupuk terdapat perbedaan yang cukup signifikan, seperti pada kebijakan pupuk subsidi Tahun 2021 dengan kebijakan subsidi pupuk pada Tahun 2024. Pada kebijakan lama sesuai dengan Permentan No 41 tahun 2021, pupuk bersubsidi masih berfokus pada penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) secara tahunan dengan cakupan jenis pupuk, subsektor, dan komoditas yang relatif luas. Pada saat kebijakan ini diberlakukan petani sering kali menggunakan pupuk secara berlebihan tanpa memperhatikan dosis dan kebutuhan tanaman sehingga menyebabkan degradasi tanah dan penurunan kualitas ekosistem pertanian. Pemupukan kimia yang tidak berimbang bisa membuat tanaman mudah terserang organisme pengganggu tanaman, penurunan produksi yang tidak sesuai dengan varietas, tanaman menjadi kerdil dan pembungaan dini (Ponisri *et al.*, 2021). Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan petani pada pupuk yang bersubsidi dapat menjadi masalah dalam kemajuan sektor pertanian, di mana peningkatan hasil dalam waktu singkat justru membahayakan keberlangsungan ekosistem pertanian di masa mendatang.

Menyikapi hal tersebut kemudian diberlakukan kebijakan baru yaitu pada Permentan No 1 Tahun 2024 yang mengarah pada reformasi tata kelola dengan menekankan efisiensi anggaran, ketepatan sasaran penerima, serta penggunaan basis data yang lebih akurat dan terintegrasi, seperti e-RDCK dan data spasial lahan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pengurangan jenis pupuk bersubsidi hanya difokuskan pada pupuk Urea dan NPK, serta pembatasan jumlah pupuk yang dapat dibeli petani berdasarkan ketetapan pemerintah dan data e-RDCK. Berdasarkan data alokasi subsidi pupuk, petani padi memperoleh pupuk urea sebesar 275 kg/ha dan pupuk NPK sebesar 250 kg/ha per musim tanam. Selain itu kebijakan pengurangan subsidi pupuk juga dilakukan sebagai upaya mendorong terciptanya sistem pertanian yang lebih berkelanjutan (*sustainable agriculture*). Pemerintah mulai mengarahkan kebijakan pengurangan subsidi pupuk agar petani

menggunakan pupuk secara lebih efisien dan berimbang, serta meningkatkan pemanfaatan pupuk organik dan praktik budidaya ramah lingkungan. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mampu menjaga produktivitas pertanian, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya lahan dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dalam jangka panjang (Tafonao *et al.*, 2024).

Kondisi ini menyebabkan petani tidak dapat memperoleh pupuk secara bebas sesuai kebutuhan di lahan, jumlah pupuk yang diterima setelah diberlakukan pembatasan seringkali tidak mencukupi kebutuhan tanaman, karena alokasi yang diberikan bersifat terbatas dan harus mengikuti standar dosis yang telah ditentukan pemerintah. Akibatnya, petani dihadapkan pada dua pilihan, yaitu membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi atau mengurangi penggunaan pupuk yang berdampak pada penurunan produktivitas dan meningkatkan biaya produksi usahatani padi.

Pada kenyataannya pupuk bersubsidi masih menjadi pilihan utama bagi banyak petani. Berdasarkan Kementan (2015), sekitar 41,71% petani masih mengandalkan pupuk bersubsidi sepenuhnya. Jika pupuk bersubsidi dibatasi pembeliannya, sebagian petani membeli pupuk merek non-subsidi. Kondisi ini mendorong petani untuk menggunakan pupuk dengan harga non-subsidi untuk memenuhi kebutuhan tanaman, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pengeluaran dan berdampak pada penurunan pendapatan bersih usahatani padi (Bangun *et al.*, 2024). Sebagai respon terhadap meningkatnya harga pupuk dan tingginya biaya produksi, petani kecil yang tidak memiliki dana membeli pupuk non-subsidi biasanya memilih mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan menambah pupuk organik untuk memenuhi kebutuhannya. Melalui pengurangan penggunaan pupuk anorganik dan peningkatan pemanfaatan bahan organik, unsur hara tanah diharapkan tetap tersedia secara optimal, sehingga kesuburan tanah dapat terjaga dan keberlanjutan usahatani padi dapat ditingkatkan.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi tersebut penerapan budidaya tanaman sehat muncul sebagai alternatif yang signifikan dalam mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan. Konsep ini merupakan pengembangan dari prinsip pengendalian hama terpadu (PHT) yang memadukan beragam teknologi budidaya berbasis ramah lingkungan (Ariyanto *et al.*, 2023). Selain itu penerapan metode

budidaya tanaman sehat memiliki kandungan hara yang baik serta dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan aktivitas biologi tanah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pupuk organik dapat menekan biaya produksi hingga 30% serta meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan (Maman *et al.*, 2021; (Munthe, 2025).

Kondisi ini menjadi latar belakang penting bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan sistem tanaman padi sehat sebagai alternatif budidaya yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.

Tanaman padi sehat adalah bentuk pertanian yang mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan menambahkan bahan organik yang tersedia di lingkungan petani, Padi Sehat dibudidayakan dengan menggabungkan berbagai teknologi budidaya ramah lingkungan dengan prinsip budidaya tanaman sehat (BTS) (Safriyani *et al.*, 2025). Namun, penerapan sistem ini di Kabupaten Jember masih bersifat terbatas dan belum merata di seluruh wilayah. Hanya beberapa kecamatan yang telah menerapkan praktik padi sehat secara konsisten, di antaranya Kecamatan Sukorambi, Jenggawah, Bangsalsari dan Sumberjambe, sementara sebagian besar petani lain masih bergantung pada sistem budidaya konvensional yang mengandalkan pupuk bersubsidi.

Kebijakan subsidi pupuk berkaitan erat dengan tingkat produktivitas lahan usahatani padi, karena pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan hasil pertanian. Subsidi pupuk yang diberikan oleh pemerintah bertujuan mengurangi biaya penggunaan pupuk agar para petani bisa menggunakan pupuk secara tepat sesuai kebutuhan tanaman. Ketersediaan pupuk dengan harga murah diharapkan mampu meningkatkan penggunaan lahan secara efisien dan meningkatkan hasil panen per hektare. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya tergantung pada besarnya subsidi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan secara tepat, serta cara petani dalam menggunakan pupuk. Jika pupuk digunakan berlebihan karena harganya murah, maka kualitas tanah dan hasil panen jangka panjang bisa menurun. Selain itu, jika distribusi pupuk tidak merata, maka sebagian lahan tidak akan

mendapatkan nutrisi yang cukup. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis perbedaan produktivitas lahan sebelum dan sesudah kebijakan, sehingga berdasarkan analisa lebih lanjut dapat diketahui dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap produktivitas lahan pada usahatani padi di Kabupaten Jember.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan struktur biaya pemupukan usahatani padi sebelum dan sesudah kebijakan pengurangan subsidi pupuk pada usahatani padi di Kabupaten Jember?
2. Apakah terdapat perbedaan jumlah penggunaan pupuk sebelum dan sesudah kebijakan pengurangan subsidi pupuk pada usahatani padi di Kabupaten Jember?
3. Apakah terdapat perbedaan produktivitas lahan sebelum dan sesudah kebijakan pengurangan subsidi pupuk pada usahatani padi di Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi dan menghitung perbedaan struktur biaya pemupukan usahatani padi sebelum dan sesudah kebijakan pengurangan subsidi pupuk pada usahatani padi di Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis perbedaan jumlah penggunaan pupuk sebelum dan sesudah kebijakan pengurangan subsidi pupuk pada usahatani padi di Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis perbedaan produktivitas lahan usahatani padi sebelum dan sesudah kebijakan pengurangan subsidi pupuk pada usahatani padi di Kabupaten Jember.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Menambah wawasan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang sosial ekonomi pertanian, khususnya dalam bidang agribisnis terkait kebijakan subsidi pupuk.
2. Menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait budidaya tanaman padi sehat.

3. Sebagai acuan untuk pemerintah dalam pembuatan kebijakan-kebijakan di dalam usahatani padi, khususnya masalah subsidi pupuk.
4. Memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan budidaya tanaman padi sehat sebagai upaya menekan biaya produksi dan keberlanjutan lingkungan.

